

## **KEPENTINGAN NASIONAL JEPANG DALAM SENGKETA LAUT CHINA SELATAN**

**Iroth Sonny Edhie<sup>1</sup>, Agus Subagyo<sup>2</sup>, Yusep Ginanjar<sup>3</sup>**

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia
2. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia
2. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

### **ABSTRACT**

Japan's national interests in the South China Sea dispute, a region critical to Japan's economic stability and security. As an island nation heavily reliant on energy and raw material imports, Japan views the South China Sea as a vital trade route connecting its economy to major energy resources in the Middle East and Africa, as well as markets in Southeast Asia and Europe. This dependence places Japan in a vulnerable position, where any disruption to maritime routes could directly impact its national economy. Additionally, China's growing military presence in the region is perceived as a threat to regional stability, potentially affecting freedom of navigation and the rule-based international order that Japan supports. In response, Japan has adopted an approach that combines multilateral diplomacy, military cooperation with regional allies, and efforts to diversify energy sources and trade routes. Japan also advocates for resolving disputes through international law, particularly the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Considering the challenges faced and measures taken, Japan seeks to maintain regional stability and protect its national interests in the South China Sea while ensuring that the area remains open and safe for international trade. This abstract provides an overview of the complexities surrounding Japan's interests in the region and the policies implemented to secure them.

Keyword : National Interests, Japan and the South China Sea Dispute

### **ABSTRAK**

Kepentingan nasional Jepang dalam sengketa Laut Cina Selatan, sebuah kawasan yang sangat penting bagi stabilitas ekonomi dan keamanan Jepang. Jepang, sebagai negara kepulauan yang sangat bergantung pada impor energi dan bahan baku, melihat Laut Cina Selatan sebagai jalur perdagangan vital yang menghubungkan perekonomiannya dengan sumber daya energi utama di Timur Tengah dan Afrika, serta pasar di Asia Tenggara dan Eropa. Ketergantungan ini menempatkan Jepang pada posisi yang rentan terhadap gangguan di jalur maritim ini, yang dapat berdampak langsung pada perekonomian nasionalnya. Selain itu, meningkatnya kehadiran militer Cina di kawasan tersebut dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas regional, yang dapat mempengaruhi kebebasan navigasi dan tatanan internasional berbasis aturan yang didukung oleh Jepang. Dalam merespon situasi ini, Jepang mengadopsi pendekatan yang menggabungkan diplomasi multilateral, kerjasama militer dengan sekutu- sekutu di kawasan, serta upaya untuk mendiversifikasi sumber energi dan rute perdagangan. Jepang juga mendukung penyelesaian sengketa melalui hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Dengan mempertimbangkan tantangan yang dihadapi dan langkah-langkah yang diambil, Jepang berupaya untuk menjaga stabilitas kawasan dan melindungi kepentingan nasionalnya di Laut Cina Selatan, sambil memastikan bahwa kawasan ini tetap terbuka dan aman bagi perdagangan internasional. Abstrak ini memberikan gambaran tentang kompleksitas kepentingan Jepang di kawasan tersebut serta kebijakan yang diambil untuk mengamankannya.

Kata kunci : Kepentingan Nasional, Jepang dan Sengketa Laut Cina Selatan

## PENDAHULUAN

Kepentingan nasional Jepang dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan merupakan salah satu aspek penting dalam kebijakan luar negeri negara yang mencerminkan kepentingan strategis, ekonomi, dan keamanan Jepang di kawasan Asia-Pasifik. Sengketa Laut Tiongkok Selatan, yang melibatkan beberapa negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Tiongkok, telah menjadi salah satu titik fokus utama dalam dinamika geopolitik di kawasan tersebut. Sementara itu, Jepang tidak terlibat dalam konflik Laut Tiongkok Selatan serta tidak memiliki kepentingan kedaulatan atas Laut Tiongkok Selatan, namun Jepang memiliki kepentingan yang besar terkait dengan jalur perdagangan internasionalnya (*Ministry of Economy, Trade, and Industry*, 2018). Sebagai negara industri, Jepang membutuhkan pasokan energi yang besar namun dilihat dari ketersediaan sumber daya, negara Jepang diklasifikasikan dengan negara yang memiliki kemajuan teknologi namun memiliki sedikit sumber daya alam seperti sumber energi yang berguna untuk perkembangan energi. Maka dari itu dengan segala keterbatasan sumber daya alam telah menjadikan negara ini untuk memenuhi kebutuhan energinya dan menjadikan Jepang bergantung pada impor energi dari luar cakupan wilayah nya seperti negara penghasil minyak mentah yakni Timur Tengah dan Laut Tiongkok Selatan yang memiliki kandungan minyak mentah dan gas alam.

Laut Tiongkok Selatan adalah salah satu jalur perdagangan laut tersibuk di dunia, dengan sekitar sepertiga dari perdagangan maritim global melewati kawasan ini. Jepang, sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia yang sangat bergantung pada perdagangan internasional, memiliki kepentingan besar untuk memastikan stabilitas dan keamanan di jalur ini. Setiap gangguan terhadap kebebasan navigasi di Laut Tiongkok Selatan dapat berdampak signifikan pada perekonomian Jepang, terutama mengingat ketergantungan negara tersebut pada impor energi dan bahan baku dari Timur Tengah dan Afrika. Selain itu, Laut Tiongkok Selatan juga kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak, gas alam, dan sumber daya laut lainnya, yang menjadikannya kawasan yang strategis untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomi. Meskipun Jepang tidak terlibat langsung dalam sengketa teritorial di kawasan tersebut, negara ini memiliki kepentingan dalam menjaga akses yang aman dan adil ke sumber daya tersebut, baik melalui hubungan ekonomi dengan negara-negara yang terlibat dalam sengketa maupun melalui partisipasi dalam

mekanisme internasional yang bertujuan untuk mengatur eksploitasi sumber daya di kawasan tersebut (Toyoda Masakazu, 2012).

Laut Tiongkok Selatan merupakan jalur terpenting bagi Jepang untuk melakukan segala kegiatan tersebut, sehingga ini merupakan suatu tantangan bagi Jepang untuk menjaga stabilitas keamanan Negara maupun kawasan terkait dengan sengketa yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan. Dalam konflik Laut Tiongkok Selatan, Jepang mengambil kebijakan aktif. Setiap negara menyerukan perdamaian di Laut Tiongkok Selatan termasuk Jepang. Jepang tidak hanya menyerukan perdamaian di Laut Tiongkok selatan, tetapi Jepang juga melakukan beberapa tindakan energi memainkan peranan penting bagi perekonomian Jepang, sehingga faktor keamanan dan ketersediaan pasokan energi sangat penting bagi negara ini (William et all, 2007). Sehubungan dengan kepentingan nasional Jepang dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan, terdapat beberapa literatur yang dapat di jadikan sebagai rujukan, seperti penelitian (Harini, 2011) yang menjelaskan jika Laut Tiongkok Selatan merupakan kawasan perairan yang mengandung banyak potensi konflik, karena dilihat dari letak geografis Laut Tiongkok Selatan menunjukkan adanya tumpang tindih perbatasan. Selanjutnya penelitian (Sulistiyani dan Sari, 2021) menyebutkan meskipun Indonesia bukan merupakan claimant state dalam sengketa LCS, namun Indonesia memiliki kepentingan nasional di LCS, khususnya dalam menjaga kedaulatan wilayah di Laut Natuna Utara. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia senantiasa mencermati dinamika yang terjadi di LCS dan meningkatkan koordinasi antar institusi terkait baik di tingkat nasional maupun regional.

Mengacu kepada hasil penelitian sebelumnya, dapat dilihat jika hasil penelitian memberikan gambaran kepentingan sebuah negara yang berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan. Namun belum menjelaskan negara yang tidak memiliki perbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan seperti Jepang, pada penelitian ini dilakukan analisa mendalam mengenai kepentingan Jepang di laut Tiongkok Selatan.

## **KERANGKA ANALITIK**

Untuk memperoleh kedalaman dan kebaruan dari penelitian ini, maka penulis perlu menguraikan teori yang relevan dengan berbagai sudut pandang yang dapat digunakan dalam rangka menunjang pembahas. Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini, yaitu

### 1. Teori Neo-Realisme

Dalam neorealisme, ada enam kunci yang menjadi pembahasan utama yaitu anarki, struktur, kemampuan, distribusi kekuatan, polarity dan kepentingan nasional. Dalam neorealisme, sebaliknya, struktur sistem, khususnya distribusi kekuatan relatif, merupakan fokus analitis utama. Aktor-aktor kurang begitu penting sebab struktur memaksa mereka beraksi dengan cara-cara tertentu (Robert dan Georg, 2009). Neorealisme percaya bahwa struktur internasional lah yang mempengaruhi negawaran untuk membuat suatu kebijakan. Mereka juga meyakini bahwa ada pembagian kekuatan serta hadirnya aktor non-negara yang dapat memperbaiki atau menengahi persaingan antar negara di Asia Tenggara. Sifat alami dari negara untuk mencari keamanan memaksa negara untuk waspada terhadap kerjasama internasional dan organisasi internasional (Yulius, 2007).

### 2. Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat kebijakan luar negeri sebuah negara. Lebih lanjut, kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur pembentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi (Perwita & Yani, 2005 : 35). Kepentingan nasional (*national interest*) berisi tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan negara, seperti keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan (*prosperity*) (Rudy, 2002). Oleh karena itu, dalam merumuskan kepentingan nasional, hal yang perlu dipertimbangkan adalah kapabilitas negara dalam kekuasaan.

### 3. Konsep *Regional Security Complex*

*Regional Security Complex* menurut Barry Buzan adalah sekelompok negara yang permasalahan keamanannya saling berhubungan sehingga tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Selain itu, Buzan mengungkapkan bahwa *region* atau wilayah bukan hanya sebuah teritori saja akan tetapi kawasan yang mana proses sekuritisasi, desekuritisasi maupun interaksi keduanya saling berhubungan sehingga permasalahan keamanan tersebut tidak dapat dianalisis secara terpisah. *Regional Security Complex* juga dipengaruhi oleh faktor sejarah, budaya dan letak geografis sebuah kawasan, dimana letak geografis yang berdekatan akan menghasilkan kompleksitas keamanan di antara negara-

negara tetangga. Dampak dari kedekatan letak geografis yang paling nyata adalah dalam sektor militer, politik, sosial dan lingkungan yang dipengaruhi adanya ketergantungan atau interdependensi hubungan keamanan antarnegara dalam Kawasan (Barry dan Waeber, 2023).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif yang lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke subtansi makna dari fenomena. Pada metode ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan melalui literatur seperti skripsi, buku, jurnal dan laporan. Sedangkan untuk analisis data dilakukan melalui reduksi data dan penyajian data.

## **PEMBAHASAN**

Konflik Laut Cina selatan mempunyai kaitan yang sangat erat dengan Jepang, mengingat Jepang mempunyai kepentingan yang sangat besar di kawasan Laut Cina Selatan. Jepang memiliki kepentingan ekonomi yang signifikan di Laut Cina Selatan karena kawasan ini merupakan salah satu jalur perdagangan terpenting di dunia. Sekitar sepertiga dari perdagangan maritim global melewati Laut Cina Selatan, termasuk pengiriman minyak, gas, dan bahan baku penting lainnya yang sangat dibutuhkan oleh ekonomi Jepang. Bagi Jepang, Laut Cina Selatan berfungsi sebagai koridor vital yang menghubungkan perekonomiannya dengan sumber daya energi utama di Timur Tengah dan Afrika serta pasar di Eropa dan Asia Tenggara. Setiap tahun, ratusan miliar dolar barang dagangan Jepang, termasuk minyak mentah, gas alam, dan produk manufaktur, diangkut melalui Laut Cina Selatan. Ketergantungan Jepang pada impor energi, khususnya minyak dan gas alam, menempatkan negara ini pada posisi yang rentan terhadap gangguan di jalur maritim ini. Apabila terjadi ketidakstabilan di kawasan tersebut, baik karena konflik bersenjata, blokade, atau tindakan sepihak yang menghambat kebebasan navigasi, dampaknya bisa sangat merugikan bagi perekonomian Jepang. Hal ini mencakup peningkatan biaya pengiriman, keterlambatan dalam rantai pasokan, serta lonjakan harga energi yang dapat menekan sektor industri Jepang yang sangat bergantung pada impor energi.

Jepang adalah negara yang miskin sumber daya alam dan sangat bergantung pada impor energi dan bahan mentah untuk mendukung perekonomiannya yang maju. Sekitar 90% dari kebutuhan energi Jepang, termasuk minyak, gas alam, dan batubara, diimpor dari luar negeri, sebagian besar melalui jalur maritim yang melewati Laut Cina Selatan. Ketergantungan ini tidak hanya membuat Jepang rentan terhadap fluktuasi harga global tetapi juga terhadap ancaman keamanan di jalur maritim. Oleh karena itu, stabilitas dan keamanan jalur perdagangan di Laut Cina Selatan menjadi vital bagi keberlangsungan ekonomi Jepang. Gangguan terhadap kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan, baik karena konflik bersenjata maupun tindakan sepihak oleh negara-negara yang terlibat dalam sengketa, dapat mengancam aliran perdagangan ke dan dari Jepang. Hal ini bisa berdampak langsung pada perekonomian Jepang, termasuk kemungkinan meningkatnya biaya pengiriman, harga energi, dan ketidakpastian pasar. Dengan demikian, Jepang memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa Laut Cina Selatan tetap terbuka dan aman bagi semua negara.

Sebagai tanggapan terhadap ketidakpastian di Laut Cina Selatan, Jepang telah mengembangkan berbagai kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan memastikan kelangsungan pasokan energi dan perdagangan. Salah satu langkah yang diambil Jepang adalah diversifikasi sumber energi, termasuk peningkatan investasi dalam energi terbarukan dan nuklir, untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi dari luar negeri. Jepang juga telah memperkuat hubungan perdagangan dengan negara-negara di Asia Tenggara melalui berbagai perjanjian perdagangan bebas dan investasi. Perjanjian ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan perdagangan bilateral tetapi juga untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang dapat membantu mengurangi dampak negatif dari ketidakstabilan di Laut Cina Selatan. Misalnya, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) adalah salah satu inisiatif yang didukung oleh Jepang untuk memperkuat integrasi ekonomi di kawasan Asia-Pasifik. Di sisi lain, Jepang juga telah meningkatkan keterlibatan dalam forum- forum internasional untuk mengadvokasi pentingnya kebebasan navigasi dan hukum internasional di Laut Cina Selatan. Hal ini mencerminkan komitmen Jepang untuk melindungi kepentingan ekonominya melalui jalur diplomatik dan multilateral, sekaligus mengurangi risiko konflik yang dapat mengganggu perdagangan dan ekonomi global.

Dari perspektif keamanan nasional, Jepang memandang Laut Cina Selatan sebagai kawasan yang sangat strategis. Meningkatnya kehadiran militer Cina di kawasan ini, termasuk pembangunan pangkalan militer di pulau-pulau buatan, telah menimbulkan kekhawatiran di Jepang tentang potensi eskalasi konflik yang dapat mengancam stabilitas regional. Jepang melihat tindakan Cina ini sebagai ancaman langsung terhadap tatanan internasional berbasis aturan dan terhadap keamanan nasional Jepang. Dalam menanggapi ancaman ini, Jepang telah memperkuat kerjasama militer dengan sekutu-sekutunya di Asia Tenggara, seperti Filipina dan Vietnam, serta dengan Amerika Serikat. Kerjasama ini bertujuan untuk menyeimbangkan kekuatan di kawasan dan mencegah dominasi sepihak oleh Cina. Jepang juga telah meningkatkan kapasitas pertahanannya sendiri, termasuk dengan mengembangkan kemampuan maritim yang lebih kuat dan modern. Sebagai bagian dari strategi pertahanannya, Jepang juga mendukung kebebasan navigasi melalui latihan militer bersama dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain di kawasan. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen Jepang untuk menjaga keamanan dan stabilitas di Laut Cina Selatan, yang juga penting untuk melindungi kepentingan nasionalnya (Willy, 2019).

Sebagai upaya untuk mengamankan kepentingannya, maka Jepang berusaha untuk meningkatkan perannya dalam bidang Politik dan keamanan, hal ini ditunjukkan dengan masuknya Jepang dalam forum kerjasama *Asean Regional Forum* (ARF). Dalam ARF disamping motif kerjasama ekonomi, dorongan lainnya terkait dengan motif politik dan keamanan. Dalam kaitannya dengan Konflik Laut Cina Selatan, ARF dapat dimanfaatkan oleh anggotanya, khususnya Jepang untuk menghindari rivalitas antar negara dan sekaligus untuk menghindarkan kemungkinan campur tangan pihak luar terhadap kawasan Asia Pasifik. Selain itu, Jepang secara konsisten mendukung penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan melalui mekanisme hukum internasional, khususnya berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Jepang memandang bahwa klaim teritorial yang diajukan oleh Cina, terutama yang didasarkan pada "sembilan garis putus-putus," tidak memiliki dasar hukum yang sah menurut UNCLOS. Jepang juga mendukung putusan Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) pada tahun 2016, yang menyatakan bahwa klaim Cina atas sebagian besar Laut Cina Selatan tidak valid. Dari sudut pandang Jepang, menghormati hukum internasional adalah kunci untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan ini. Jepang khawatir

bahwa jika Cina terus menolak keputusan pengadilan internasional dan bertindak sepihak, hal ini dapat menciptakan preseden buruk yang bisa mengancam tatanan internasional yang berbasis aturan. Oleh karena itu, Jepang mendorong dialog multilateral dan pendekatan berbasis aturan dalam menyelesaikan sengketa ini (Indonesian.cri.cn, 2012).

Aliansi dengan Amerika Serikat adalah pilar utama dari kebijakan luar negeri dan keamanan Jepang. Dalam konteks sengketa Laut Cina Selatan, Jepang memandang kerjasama dengan Amerika Serikat sebagai cara untuk menyeimbangkan pengaruh Cina dan memastikan bahwa kawasan ini tetap terbuka dan bebas. Jepang juga telah memperluas kerjasama militernya dengan negara-negara di Asia Tenggara, termasuk dengan memberikan bantuan keamanan dan teknologi pertahanan. Di sisi lain, Jepang juga aktif dalam berbagai forum multilateral, seperti *ASEAN Regional Forum (ARF)* dan *East Asia Summit (EAS)*, untuk mempromosikan dialog dan kerjasama regional dalam menangani sengketa ini. Jepang berusaha untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara ASEAN sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk memastikan bahwa kepentingan-kepentingannya di Laut Cina Selatan terlindungi.

Meskipun Jepang telah mengambil berbagai langkah untuk melindungi kepentingannya di Laut Cina Selatan, masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana Jepang dapat terus memainkan peran yang efektif dalam menyeimbangkan kekuatan di kawasan tanpa memicu eskalasi konflik dengan Cina. Jepang harus berhati-hati dalam memastikan bahwa kebijakannya tidak memprovokasi tindakan balasan yang dapat memperburuk situasi. Selain itu, Jepang juga harus berhadapan dengan dinamika politik dan keamanan yang kompleks di Asia Tenggara, di mana negara-negara yang terlibat dalam sengketa memiliki kepentingan nasional yang beragam dan kadang bertentangan. Jepang harus mampu menavigasi situasi ini dengan bijaksana untuk menjaga hubungan baik dengan semua pihak yang terlibat, sambil tetap mempertahankan kepentingan nasionalnya. Ke depan, Jepang kemungkinan akan terus memperkuat kerjasama dengan negara-negara ASEAN dan sekutu-sekutunya, serta meningkatkan kehadiran diplomatik dan militernya di kawasan ini. Jepang juga mungkin perlu mengembangkan strategi yang lebih komprehensif untuk menangani berbagai aspek dari sengketa ini, baik dari sudut pandang ekonomi, militer, maupun diplomatik.



## KESIMPULAN

Kepentingan nasional Jepang dalam sengketa Laut Cina Selatan merupakan bagian integral dari strategi luas negara tersebut dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan kemakmuran di kawasan Asia-Pasifik. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kepentingan ekonomi, keamanan nasional, dan hukum internasional, Jepang terus berusaha untuk memainkan peran yang konstruktif dalam menyelesaikan sengketa ini melalui jalur diplomatik dan kerja sama multilateral. Meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar, Jepang tetap berkomitmen untuk menjaga kebebasan navigasi dan stabilitas di Laut Cina Selatan, sebagai bagian dari upayanya untuk mempertahankan posisi strategisnya di kawasan Asia-Pasifik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Willy F. Sumakul, Potensi Konflik Laut Cina Selatan, dalam <http://www.fkpmaritim.org/?p=250>,
- Barry Buzan and Ole Waever. (2003). *Region and Powers: The Structure of International Security*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Sulistiyani, Y. A., Pertiwi, A. C., & Sari, M. I. (2021). *Respons Indonesia Terhadap Sengketa Laut China Selatan Semasa Pemerintahan Joko Widodo [Indonesia's Responses toward the South China Sea Dispute During Joko Widodo's Administration]*. Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional, 12(1), 85-103.
- Harini, S. (2011). Kepentingan Nasional China Dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan. Transformasi, Vol 14, No 21.
- William T. Tow, Mark J. Thomson, Yoshinobu Yamamoto, and Satu P. Limaye. (2007). *Asia- Pacific Security: US, Australia and Japan and The New Security Triangle*, New York: Routledge
- AS dan Jepang Intensifkan Kerja Sama Hankam, dalam <http://indonesian.cri.cn/201/2012/05/01/1s127331.htm>,